



## **AUDIT OPERASIONAL ATAS BIAYA PERJALANAN DINAS DAN TUGAS BELAJAR (STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS XYZ)**

**Arya Gina Tarigan**

[aryagina.uki@gmail.com](mailto:aryagina.uki@gmail.com)

Universitas Kristen Indonesia

**Carmel Meiden**

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta Utara

[carmel.meiden@kwikkiangie.ac.id](mailto:carmel.meiden@kwikkiangie.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The objective of the operational audit is to analyze whether the disbursement process and the cost accountability for official travel and study assignments have been running effectively and efficiently in accordance with the Standard Operational Procedure (SOP) in the university, and identify problems that arise as a result of the inefficiency and ineffectiveness of the accountability process at XYZ University.*

*The research method used in this research is descriptive analysis by collecting data so that it can provide a fairly clear picture of the object under study to make conclusions. In addition, researchers collect and process the results of questionnaires related to internal control and conduct interviews with related parties.*

*From the research conducted, it is known that the costs of official travel and study assignments are uncollectible advances that arise because there is no responsibility for these costs. Internal control over the provision of official travel costs and study assignments is considered effective, but accountability for these costs is considered less effective. Apart from this, the accountability for costs that have been incurred but canceled by means of returning the down payment is deemed inefficient. The main cause of the ineffectiveness and inefficient of this procedure is the lack of firmness in imposing sanctions on employees who do not carry out accountability for the costs of official travel and study assignments. The recommendations put forward by researchers need to be implemented by the university as a step towards improving the procedure for giving and accounting for costs for official travel and study assignments.*

*Keywords: Operational Audit, Cost, Down Payment.*

### **ABSTRAK**

Tujuan dari audit operasional adalah untuk melakukan analisa apakah proses pencairan dan pertanggungjawaban biaya atas perjalanan dinas dan tugas belajar telah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan *Standar Operational Procedure (SOP)* yang berlaku dalam universitas, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari inefisien dan inefektif proses pertanggungjawaban biaya tersebut pada Universitas XYZ.



Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif yakni dengan cara mengumpulkan data dan mengelolanya sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti untuk membuat kesimpulan. Selain itu peneliti mengumpulkan dan mengolah hasil kuesioner terkait pengendalian internal serta melakukan wawancara pada pihak terkait.

Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa biaya atas perjalanan dinas dan tugas belajar menjadi uang muka tidak tertagih yang muncul karna tidak dilakukannya pertanggungjawaban atas biaya tersebut. Pengendalian internal atas pemberian biaya perjalanan dinas dan tugas belajar dinilai efektif, namun untuk pertanggungjawaban biaya tersebut dinilai kurang efektif. Selain in itu pertanggungjawaban biaya yang telah dikeluarkan namun batal digunakan dengan cara pengembalian uang muka dinilai tidak efisien. Penyebab utama inefektif dan inefisien prosedur ini ialah karena kurangnya ketegasan pemberlakuan sanksi bagi pegawai yang tidak melakukan pertanggungjawaban biaya atas perjalanan dinas dan tugas belajar. Adapun rekomendasi yang diajukan oleh peneliti perlu dilaksanakan oleh universitas sebagai langkah tindakan perbaikan prosedur pemberian dan pertanggungjawaban biaya atas perjalanan dinas dan tugas belajar.

Kata Kunci: Audit Operasional, Biaya, Uang Muka.

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa “Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Perguruan Tinggi wajib melakukan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa pendidikan tinggi berfungsi untuk:

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
2. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, *responsive*, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma,
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai kemanusiaan.

Sedangkan laporan keuangan adalah informasi yang berisi tentang kondisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan sebuah pertanggungjawaban atas kegiatan operasional yang dilakukan dalam periode tertentu. Laporan keuangan harus memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami, dimana informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan.

Pada institusi pendidikan swasta yang pendanaan operasionalnya dari masyarakat dan donator, laporan keuangan merupakan bagian penting dalam tata kelola universitas. Laporan keuangan universitas harus menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan universitas menampilkan kondisi keuangan universitas, yang juga memberi gambaran tentang perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai.



Menurut Bahri (2016:134) “laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan. Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah informasi penting yang dibutuhkan oleh pihak-pihak pemakai informasi dalam mengambil keputusan.”

Sedangkan auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Agoes (2016:4) mendefinisikan “auditing sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, adapun tujuannya adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang ada.”

ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concept*) mendefinisikan “auditing sebagai suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” Dari pengertian tersebut auditing dapat diuraikan menjadi tujuh elemen penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Proses yang sistematis,
2. Menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif,
3. Asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi,
4. Menentukan tingkat kesesuaian (*degree of correspondence*)
5. Kriteria yang ditentukan
6. Menyampaikan hasil
7. Para pemakai kepentingan

Audit operasional untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian tertentu dari prosedur dan metode operasional organisasi. Pada saat suatu audit operasional selesai dilaksanakan, manajemen biasanya akan mengharapkan masukan atau rekomendasi hal-hal apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Mengingat luasnya ruang lingkup dalam audit operasional biasanya auditor tidak mungkin untuk menentukan ciri-ciri pelaksanaan audit operasional secara pasti. Pada suatu organisasi auditor mungkin akan mengevaluasi kecukupan informasi sebagai alat untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan, tidak hanya terbatas pada penelaahan (*review*) atas laporan keuangan tetapi juga dalam struktur organisasi, pembelian bahan baku dan juga metode produksi serta bagian lainnya yang dikuasai oleh auditor.

Uang muka merupakan dana yang dikeluarkan universitas untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan. Prosedur pemberian uang muka terdiri dari bagian-bagian penting yaitu pengajuan, pemberian hingga pertanggungjawaban biaya yang telah dikeluarkan. Biaya yang tidak dipertanggungjawabkan akan menjadi uang muka tidak tertagih dan pada neraca laporan keuangan dan terdapat dalam akun piutang lancar yakni piutang pegawai. Piutang lancar merupakan aktiva bagi sebuah entitas yang dimaksudkan dapat dicairkan dalam jangka pendek yaitu kurang dari satu tahun, sedangkan pada kenyataannya piutang tersebut seharusnya menjadi biaya bagi universitas.

Sebagai sebuah lembaga nirlaba, Universitas XYZ wajib melaporkan pertanggungjawaban dan penyelesaian atas kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuannya. Selain itu laporan keuangan universitas



harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan donator sebagai pihak pemberi dana universitas. Melihat cukup tingginya uang muka tidak tertagih tersebut, hal ini akan mengganggu keberlangsungan kegiatan operasional di Universitas XYZ selanjutnya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap uang muka tidak tertagih yang dihadapi oleh Universitas XYZ. Selain itu perlu dibuatkan beberapa kebijakan guna menegakkan prosedur yang telah ada agar dapat direalisasikan. Hal ini untuk meminimalisasikan semakin besarnya uang muka tidak tertagih dan perbaikan laporan keuangan Universitas XYZ.

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengevaluasi seberapa efektif proses pertanggungjawaban uang muka atas perjalanan dinas dan tugas belajar yang selama ini dijalankan oleh Universitas XYZ.
2. Untuk mengevaluasi tingkat efisiensi atas uang muka perjalanan dinas dan tugas belajar yang dikeluarkan Universitas XYZ.

## **Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran**

Dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 dijelaskan bahwa “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Perguruan Tinggi wajib melakukan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.”

Selain hal diatas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “pemerintah harus turut serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan bangsa dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia.”

Dana perguruan tinggi dikelola sepenuhnya untuk kepentingan perguruan tinggi. Kepentingan perguruan tinggi mengacu pada tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sumber dana perguruan tinggi dapat dilihat dari bentuk pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah berbentuk perguruan tinggi negeri, sedangkan perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat disebut perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri memperoleh sumber dana dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan perguruan tinggi swasta didanai oleh masyarakat melalui biaya kuliah mahasiswa dan donatur.

Menurut Bahri (2016:134) “laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan. Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Laporan



keuangan adalah informasi penting yang dibutuhkan oleh pihak-pihak pemakai informasi dalam mengambil keputusan.”

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi dan ekuitas,
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber day aekonomi, kewajiban dan ekuitas,
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi,
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
- 6) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelapor dalam mendanai aktifitasnya.

Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terdiri dari

- 1) Laporan Laba Rugi
- 2) Laporan Perubahan Ekuitas
- 3) Neraca
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Agoes (2016:4) mendefenisikan “auditing sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, adapun tujuannya adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang ada.”

Menurut Agoes (2016), “tujuan audit adalah untuk meyakinkan para pengguna ata pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang disajikan terbebas dari kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, bebas dari salah saji yang material dan sudah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Auditing bertujuan memberikan pendapat atas hasil pemeriksaan informasi keuangan untuk meningkatkan keandalan informasi yang akan digunakan.” Agoes (2016) juga menyatakan “audit operasional merupakan rangkaian pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan opsional yang telah ditentukan olen manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Halim (2015:7) disebutkan bahwa “audit operasional sebagai perluasan lingkup audit (*extend audit view*) karena memang berawal dari perluasan audit keuangan. Audit operasional pada dasarnya bertujuan untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai pelaksanaan, peristiwa, atau masalah aktual di balik fakta yang ditunjukkan oleh angka-angka keuangan. Audit operasional meliputi penghipunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional entitas dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun nilai ekonomi operasional.”

Menurut Agoes (2016:172) tujuan umum manajemen audit adalah untuk:

- 1) Menilai kinerja (*performance*) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan.



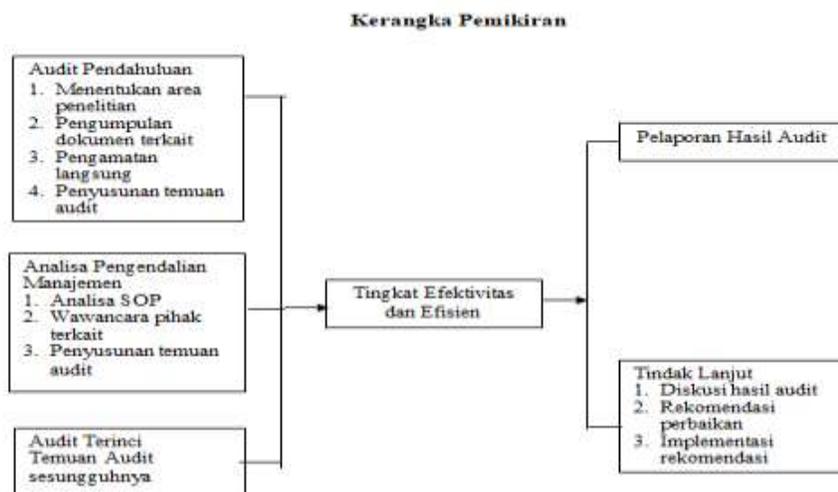
- 2) Menilai apakah berbagai sumber daya (manusia, mesin, dana, harta lainnya), yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
- 3) Menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan (*objective*) yang telah ditetapkan oleh top manajemen.
- 4) Dapat memberikan rekomendasi kepada top manajemen dan berbagai fungsi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi keekonomisan, dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan.

Menurut Agoes (2016:11) ada 4 (empat) tahapan dalam suatu manajemen audit:

- a. Survei Pendahuluan (*Preliminary Survey*)
- b. Penelaahan dan Pengujian Atas Sistem Pengendalian Manajemen (*Review and Testing of management Control System*)
- c. Pengujian Terinci (*Detailed Examination*)
- d. Pengembangan Laporan (*Report Development*)

Agoes (2016) menyatakan bahwa “uang muka adalah sejenis pengeluaran kas yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan, yang wewenang pengelolaannya didelegasikan kepada orang/staf tertentu, sesuai dengan struktur otorisasi organisasi, untuk keperluan dan jangka waktu yang telah disetujui pada formulir pengajuannya. Uang muka kegiatan yang diberikan, kemudian akan dibebankan menjadi biaya kegiatan ketika uang muka tersebut tersebut dipertanggungjawabkan oleh pemegang uang muka. Pertanggungjawaban uang muka dilakukan oleh pemegang uang muka dengan menyusun laporan pertanggungjawaban uang muka.”

Arens (2016:254) menjelaskan bahwa “efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan dari sebuah entitas atau organisasi. Dalam melakukan audit operasional seorang auditor harus mampu menilai apakah sebuah entitas telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam membuat penilaiannya auditor harus merumuskan kriteria-kriteria tertentu. Efisiensi adalah pengurangan biaya tanpa mengurangi efektifitas. Hal ini mengacu



pada besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan entitas.”



## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan riset operasional dengan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif berdasarkan laporan keuangan, pendekatan kualitatif dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada SOP perjalanan dinas, SOP tugas belajar, SOP pemberian uang muka dan SOP pertanggungjawaban uang muka, serta karakteristik perjanjian yang berpotensi untuk menyebabkan timbulnya risiko uang muka tidak tertagih pada Universitas XYZ.

Variabel yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini disusun berdasarkan masalah penulisan, tujuan penulisan, dan kerangka pemikiran, dimana memiliki fungsi sebagai petunjuk dalam menentukan alat pengambil data mana yang akan digunakan. Adapun variabel yang menjadi objek penulisan adalah sebagai berikut:

### 1. Aktivitas pengajuan uang muka,

Pengajuan uang muka adalah pencairan sejumlah uang yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan penugasaan pimpinan unit atau universitas. Pengajuan uang muka diberikan dengan persetujuan pimpinan Universitas XYZ dan harus dengan melampirkan *print out* aplikasi *budget managemant control* yang telah ditandatangani pimpinan unit. Bagi pengajuan uang muka yang telah sesuai dengan anggaran, disposisi pencairan uang muka kepala biro keuangan dan akuntansi dilakukan oleh wakil rektor sesuai dengan tujuan penggunaan uang muka.

### 2. Aktivitas pertanggungjawaban uang muka,

Pertanggungjawaban uang muka merupakan laporan atas kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan penugasaan pimpinan unit atau universitas. Laporan pertanggungjawaban biasanya terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan serta masukan yang dapat diterima oleh universitas untuk kebaikan. Pertanggungjawaban uang muka dilakukan 14 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Bukti pengeluaran yang dapat diterima dalam pertanggungjawaban uang muka berupa invoice, bon, struk pembayaran dan kwitansi. Apabila dalam laporan pertanggungjawaban masih terdapat sisa saldo, maka wajib dikembalikan ke bagian keuangan dan akuntansi.

### 3. Uang muka tidak tertagih atas perjalanan dinas dan tugas belajar,

Meliputi jumlah uang muka yang belum atau tidak dipertanggungjawabkan atas perjalanan dinas dan tugas belajar pegawai Universitas XYZ pada periode 2016-2019.

Data yang diolah oleh penulis pada penulisan ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari objek dalam hal ini adalah Universitas XYZ. Berkaitan dengan cara pengumpulan data, metode yang digunakan adalah:

#### 1. Riset Kepustakaan

Riset kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan sebagai dasar teori. Riset kepustakaan didapatkan dengan cara membaca dan meneliti buku dan literatur dan bahan referensi lainnya seperti jurnal, website, peraturan pemerintah yang berhubungan dengan variabel dan permasalahan dalam penelitian.

#### 2. Riset Lapangan

##### a. Observasi

Observasi berarti penulis memperhatikan dan melakukan peninjauan atas suatu objek. Penulis melakukan kunjungan langsung pada objek penelitian untuk mengamati dan menganalisa aktivitas pemberian dan



pertanggungjawaban uang muka atas perjalanan dinas dan tugas belajar di universitas untuk mendapatkan gambaran tentang objek penelitian.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan variabel permasalahan dalam penelitian. Kuesioner tersebut diberikan kepada pimpinan universitas dan pimpinan unit yang berwenang dalam aktivitas pemberian dan pertanggungjawaban uang muka.

c. Wawancara

Dalam tahapan ini pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi dengan pihak terkait. Wawancara pada penelitian ini dilakukan guna mendapat informasi mengenai prosedur dalam pemberian dan pertanggungjawaban yang muka atas perjalanan dinas dan tugas belajar pegawai universitas XYZ.

d. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah upaya untuk mendapatkan informasi melalui cara mengumpulkan data dan dokumen tertulis dari universitas yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang digunakan dalam pengumpulan penelitian ini adalah:

- 1) Struktur organisasi,
- 2) Uraian tugas dan tanggung jawab,
- 3) Prosedur perjalanan dinas,
- 4) Prosedur tugas belajar,
- 5) Prosedur pemberian uang muka,
- 6) Prosedur pertanggungjawaban uang muka,
- 7) Laporan keuangan atas uang muka tidak tertagih periode 2016-2019.

Teknik analisis data yang di gunakan antara lain:

1. Audit Pendahuluan

Pada tahap awal akan dilakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh gambaran proses pemberian uang muka, terutama pada perjalanan dinas dan tugas belajar pegawai sehingga dapat memberikan gambaran kepada penulis bagaimana proses ini berjalan dan pelaksanaannya di lapangan. Penulis juga berusaha mengetahui dan memahami tentang perusahaan terutama yang berhubungan dengan uang muka yang ada di Universitas XYZ dengan cara mengumpulkan data-data tertulis dan dokumen lainnya sebagai fakta awal, yang bersifat potensial untuk di dalam.

Pada audit pendahuluan penulis menganalisa prosedur terkait pemberian dan pertanggungjawaban uang muka. Penulis juga menganalisa prosedur dan ketentuan atas perjalanan dinas dan tugas belajar pegawai. Dalam proses analisa penulis juga melakukan pengamatan langsung atas prosedur tersebut. Dalam hal ini penulis menemukan bahwa prosedur telah dilakukan dengan efisien terkecuali prosedur pertanggungjawaban uang muka. Selain pengumpulan prosedur terkait, penulis melakukan analisa atas laporan keuangan yang terdiri dari laporan Laba Rugi dan Laporan Neraca atas Universitas XYZ periode 2016-2019. Prosedur diatas dilakukan untuk melakukan penyusunan temuan audit. Adapun kriteria atas temuan audit adalah seluruh uang muka atas perjalanan dinas dan tugas belajar yang belum dipertanggungjawabkan dengan periode 2014 sampai dengan 2019.

2. Review Pengendalian manajemen



Pada tahap penelaahan dan pengujian, penulis akan melakukan analisis berdasarkan data-data yang diperoleh dari tahap awal, yaitu dengan melakukan penelaahan, pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Analisisnya mencakup pemeriksaan terhadap prosedur pemberian uang muka yang berjalan di Universitas XYZ untuk melihat apakah entitas telah menjalankan sesuai dengan yang diharapkan. Penulis juga melakukan wawancara dengan divisi yang berhubungan dengan pemberian uang muka, kemudian penulis melakukan pembahasan temuan, *effects*, serta rekomendasi kepada manajemen Universitas XYZ terkait dengan pengendalian intern yang berhubungan dengan area uang muka untuk mengidentifikasi adanya kelemahan dalam pengendalian.

Pada tahapan review dan analisa pengend/alian manajemen, penulis melakukan analsi dokumen terkait dan wawancara terhadap pihak terkait. Pihak diwawancara adalah Kepala Biro SDM, Kepala BKA dan Wakil Rektor Non Akademik. Prosedur ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai kegiatan operasional dan kendala dalam melakukan prosedur yang telah ditetapkan.

### 3. Audit Terinci

Tahap ini merupakan audit terinci yang dilakukan penulis atas kerugian yang timbul di Universitas XYZ, sebagai akibat dari tidak adanya pertanggungjawaban atas uang muka yang telah dikeluarkan oleh Universitas XYZ. Dalam tahapan ini peneliti akan mengungkapkan temuan audit dan tingkat kerugian yang dialami oleh Universitas XYZ selama periode penulisan.

Penulis akan menyebarkan kuesioner untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi dari prosedur pengajuan, pemberian dan pertanggungjawaban uang muka. Sedangkan untuk mengukur tingkat efisiensi pertanggungjawaban uang muka dihitung berdasarkan presentasi pengembalian uang muka yang tidak dipertanggungjawabkan. Persentase efektifitas dan efisiensi tersebut tertuang dalam berikut:

#### Tingkat Efektifitas

Presentase	Tingkat Keefektifan
0 – 50%	Kurang
51% - 75%	Cukup
76% - 100%	Baik

#### Tingkat Efisiensi Pengembalian Uang Muka

Presentase	Tingkat Efisiensi
0 – 50%	Kurang
51% - 75%	Cukup
76% - 100%	Baik

### 4. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Penulis membuat laporan akhir atas hasil audit untuk disampaikan kepada manajemen. Laporan yang disampaikan kepada manajemen adalah mencakup temuan, penyimpangan yang terjadi, serta hal-hal yang perlu direkomendasikan untuk kebaikan bagi Universitas XYZ. Selanjutnya aka dilakukan diskusi terkait



hasil temuan tersebut. Tindak lanjut dari rekomendasi penulis dapat dijadikan penilaian dihari yang akan datang sejauh mana dampak dari rekomendasi penulis terhadap perusahaan.

## Hasil dan Pembahasan

Penyusunan temuan sementara dari peneliti bukan merupakan laporan final, melainkan sebagai media untuk mengorganisir temuan-temuan yang diperoleh selama melakukan survei pendahuluan yang akan dijadikan pedoman untuk melaksanakan tahap selanjutnya. Dalam proses penelitian peneliti menemukan terdapat Rp. 1.069.815.600,- uang muka atas perjalanan dinas dan tugas belajar tahun 2016-2019 yang belum dipertanggungjawabkan. Adapun rinciannya terdapat dalam tabel dan grafik berikut:

Uang Muka Tidak Tertagih Tahun 2016-2019

No	Fakultas/Unit	2016	2017	2018	2019	Total
1	Rektorat	-	-	14,450,000	161,336,000	175,786,000
2	FKIP	30,000,000	-	103,945,000	179,575,000	313,520,000
3	FS	-	14,930,000	-	18,990,000	33,920,000
4	FE	-	-	-	-	-
5	FH	-	-	-	-	-
6	FI	-	-	81,291,000	10,200,000	91,491,000
7	FK	35,757,000	-	25,200,000	99,462,000	160,419,000
8	FISIPOL	-	-	54,000,000	40,000,000	94,000,000
9	FV	2,580,000	-	-	39,700,000	42,280,000
10	PPs	5,379,600	-	35,000,000	148,020,000	188,399,600
<b>Total</b>		<b>73,716,600</b>	<b>14,930,000</b>	<b>313,886,000</b>	<b>697,283,000</b>	<b>1,099,815,600</b>

Pada tahapan audit terinci dilakukan pemeriksaan atas variabel-variabel yang sudah ditetapkan, yang bertujuan untuk menilai apakah prosedur pengambilan uang muka dan pertanggungjawaban uang muka telah dilakukan secara benar, juga untuk menganalisa hal-hal apa saja yang mengakibatkan prosedur tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Untuk menilai hal-hal tersebut, dilakukan analisa atas data-data dan dokumen-dokumen terkait perjalanan dinas dan tugas belajar.

### a. Analisis efektifitas prosedur pemberian uang muka

Prosedur atas perjalanan dinas, tugas belajar dan pengambilan uang muka pada Universitas XYZ telah disepakati dan ditetapkan untuk dilakukan dalam operasional kegiatan.

Kuesioner Prosedur Pemberian Uang Muka

Jabatan	Jumlah Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Presentase Efektifitas
WRKSA	10	10	0	100%
Ka. BKA	10	10	0	100%
Ka. BSDM	10	10	0	100%

bahwa presentase efektifitas atas pemberian uang muka perjalanan dinas dan tugas belajar adalah 100% yang berarti tergolong pada penilaian 'baik'. Pengendalian internal atas pemberian uang muka telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

### b. Analisis efektifitas prosedur pertanggungjawaban uang muka

Peneliti mengamati dan menganalisis penyebab tidak dilakukannya laporan pertanggungjawaban atas uang muka perjalanan dan dinas dan tugas belajar yang menyebabkan besarnya jumlah uang muka tidak



tertagih adalah kurangnya *follow up* atas pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas dan tugas belajar yang dilakukan pegawai.

Kuesioner Prosedur Pertanggungjawaban Uang Muka

Jabatan	Jumlah Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Presentase Efektifitas
WRKSA	10	5	5	50%
Ka. BKA	10	3	7	30%
Ka. BSDM	10	5	5	50%

bahwa presentase efisiensi atas pertanggungjawaban uang muka perjalanan dinas dan tugas belajar berada pada presentase kurang dari 50% yang berarti tergolong pada penilaian ‘kurang’. Pengendalian internal atas pertanggungjawaban uang muka tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini mengidentifikasi bahwa pengendalian internal atas pertanggungjawaban uang muka tidak efektif.

### c. Analisis efisiensi pengembalian uang muka

Penegakan sanksi atau pengembalian uang muka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada beberapa tugas belajar telah diberlakukan. Pegawai x adalah salah satu pegawai yang diijinkan untuk melakukan tugas belajar pada tahun 2014. Namun pada tahun 2018 pegawai x menyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajarnya sesuai dengan perjanjian tugas belajar sehingga yang bersangkutan harus melakukan pengembalian atas uang muka tugas belajar yang telah digunakan sejumlah Rp. 88.500.000,-. Pada perjanjian cicilan hutang dinyatakan bahwa pegawai x bersedia dipotong gajinya sejumlah Rp. 1.500.000,- per bulan dihitung mulai Maret 2018 hingga Januari 2023. Pemotongan gaji tersebut dilakukan langsung oleh bagian *payroll*.

$$\begin{aligned} \text{Perjanjian pengembalian uang muka} &= 59 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 88.500.000,- \\ \text{Pengembalian yang telah dilakukan sampai Desember 2019} &= 22 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 33.000.000,- \\ \text{Persentase pengembalian} &= \frac{\text{Rp. } 33.000.000,-}{\text{Rp. } 88.500.000,-} \\ &= 0.37\% \\ &= 37\% \end{aligned}$$

Maka dapat disimpulkan presentase pengembalian uang muka atas pegawai x sebesar 37% yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji secara langsung berada dalam presentase kurang efisien. Namun pemotongan tersebut akan terus dilakukan hingga Januari 2023 sehingga selama pemotongan gaji dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati maka pengembalian uang muka atas tugas belajar yang gagal diselesaikan dapat digolongkan efektif.

## Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan audit operasional atas biaya yang tidak dipertanggungjawabkan pada universitas XYZ yang meliputi prosedur perjalanan dinas dan tugas belajar, serta prosedur pemberian dan pertanggungjawaban uang muka, pengamatan, wawancara dan melakukan survei dengan menggunakan kuesioner pengendalian internal, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:



1. Prosedur pemberian biaya atas perjalanan dinas dan tugas belajar telah berjalan dengan efektif. Presentase efektifitas atas pemberian biaya berada pada tingkat baik yakni 100%.
2. Prosedur pertanggungjawaban biaya yang telah dikeluarkan atas perjalanan dinas dan tugas belajar tidak berjalan dengan efektif. Presentase efektifitas atas pertanggungjawaban biaya tersebut berada dibawah 50% yang berarti tingkat pengendalian internal kurang efektif.
3. Penegakan sanksi atas biaya yang tidak dipertanggungjawabkan belum diberlakukan secara efektif dan efisien. Hal ini menjadi penyebab terbesar atas kelalaian mempertanggungjawabkan biaya yang telah dikeluarkan universitas XYZ dan menjadi uang muka tidak tertagih pada laporan keuangan.

## **2. Saran**

Dari kesimpulan yang dijabarkan diatas penulis memberikan beberapa saran kepada Universitas XYZ sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi tingkat inefektif atas pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dan tugas belajar perlunya dilakukan sosialisasi kembali dan penegakan sanksi atas biaya yang tidak dipertanggungjawabkan. Penegakan sanksi dapat dimulai dari koordinasi antar Biro SDM dan BKA untuk mem-*follow up* pegawai yang belum melakukan pertanggungjawaban. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan tidak mengizinkan pegawai yang belum melakukan pertanggungjawaban biaya menerima biaya selanjutnya atau tidak diijinkan melakukan perjalanan dinas berikutnya.
2. Untuk mengurangi tingkat inefisien atas pertanggungjawaban biaya perlu dilakukan perluasan manajemen. Sanksi atas biaya perjalanan dinas dan tugas belajar yang tertuang dalam prosedur pertanggungjawaban uang muka yakni pemotongan gaji dilakukan dan diterapkan pada pertanggungjawaban biaya lainnya.

## **Daftar Pustaka**

Abbas, Syahrizal (2008), Manajemen Perguruan Tinggi, Jakarta: Prenada Media Group

Agoes, Sukrisno (2016), Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik, Edisi Lima, Jakarta: Salemba Empat.

Arens, Alvin A. Randal J. Elder dan Marck S. Beasley (2015). *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*, Edisi 15, Jakarta: Erlangga.

Bahri, Syaiful (2016), Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Halim, Abdul (2015), Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan, Jakarta: UPP STIM YKPN.

Darmayanti, Yayan (2017). Pengaruh Lingkungan Kerja dan SOP Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pengawas Urusan Gerbong Sukacinta (PUG SCT) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten Lahat, Jurnal. Sumatera: STIE Serelo.

Ikatan Akuntan Indonesia (2011), Standar Profesional Akuntan Publik, Yogyakarta: STIE YKPN

[Kieso](#), Donald E. Weygandt, [Jerry J. Warfield](#), [Terry D. \(2019\)](#), *Intermediate Accounting 17th edition*, Wiley.



- Learn.org.id. (2013, 3 November). Pengelolaan Uang Muka. Diakses pada 3 Januari 2020 pada <http://learn.or.id/pengelolaan-uang-muka/>.
- Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (2013). Pelatihan Fraud Auditing Tingkat Dasar, Modul 1,2 &3, Jakarta: LPFA.
- Messier, William F. Steven M. Glover. Douglas F. Prawitt (2017). Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Sistematis. Edisi Delapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi (1997), Pemeriksaan Akuntansi, Edisi 3, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Nurmalasari, Galuh Afih. AR, Moch Dzulkirom (2018). Analisis Prosedur Permintaan dan Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja Dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Intern (Studi Pada Perum Jasa Tirta I Kantor Pusat Malang). Jurnal. Malang: Universitas Brawijaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).
- Sugiyono (2005), Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tentang Perguruan Tinggi (2012).
- Wati, Dwi Erma (2015). "Audit Operasional atas Akuntansi Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja Berdasarkan Aktifitas (Studi Kasus Pada D3 Teknik Mesin FTI-ITS), Jurnal. Surabaya: Universitas Narotama.
- Zamzami, Faiz. Arifin, Ihda (2014), "Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus Pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri, Jurnal. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.